FAKTOR - FAKTOR DETERMINAN PENINGKATAN TANGGUNG JAWAB WARGA NEGARA MELALUI AKTUALISASI KEBIJAKAN

ABSTRACT

Rizal Fahmi¹; Asep Ikbal²

¹Universitas Islam
SyekhYusuf Tangerang;
²Universitas Pendidikan
Indonesia
Email:
rizalfahmi501@gmail.com

This research is motivated by problems related to the existence of street vendors in Bandung such as the lack of awareness of street vendors to participate in the implementation of local regulations so that there are still many violations that occur and there are government programs for street vendors that are not implemented optimally. This study aims to determine the extent to which street vendors participate in the implementation of the Bandung City Regulation No. 4 of 2011 so as to increase the attitude of citizens' responsibility. responsible street vendors in the city of Bandung? . In this study, the grand theory used is the theory of Richard C. Box (1998) concerning the democracy principle. This study uses a qualitative method with case studies on several research subjects including street vendors, Bandung City DPRD and Bandung City Police Satpol. The results of this study indicate that basically street vendors have understood the Bandung City Regulation Number 4 of 2011, but it is not followed up with direct actions in the form of compliance and good actions that support the implementation of regulations, it is influenced by several factors such as economic, environmental, willingness and the ability to participate is also the firmness of the government. It cannot be denied, the government has strived to foster this attitude of street vendor responsibility in various ways such as government counseling, bureaucratic development and strengthening citizen participation, but the issue of citizen responsibility is greatly influenced by individual awareness to consciously and voluntarily comply with regulations.

Keywords: Participation, Local Regulations, Responsibilities, Street Vendors, Bandung City.

A. PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat dalam negara demokrasi sangat diperlukan di berbagai aspek kehidupan terutama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan publik merupakan wujud nyata dukungan masyarakat terhadap pemerintah. Partisipasi merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Kebijakan publik tidak akan terlaksana secara efektif jika tidak ada partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat digambarkan sebagai keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dengan melaksanakan kehidupannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Partisipasi ini merupakan salah satu faktor penting demi terciptanya *good governance* dalam suatu negara.

Sebagai seorang warga negara, setiap individu terikat oleh peraturan dan harus tunduk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia serta memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia dimana pun orang tersebut tinggal. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban dalam bidang pemerintahan. Oleh karena itu partisipasi masyarakat sangat penting, karena baik dalam hal perumusan maupun pelaksanaan dan pengawasan berbagai kebijakan pemerintah. Mardikanto (2013, hlm. 82) mengemukakan pendapatnya tentang pengertian partisipasi masyarakat, bahwa :

“Suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam maupun dari luar dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, yang mencakup pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pemanfaatan hasil kegiatan yang dicapai”.

Partisipasi masyarakat dalam suatu pelaksanaan kebijakan publik sangat dibutuhkan untuk mengembangkan sinergi dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan suatu kebijakan publik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memiliki sikap partisipasi terhadap berbagai kebijakan publik yang telah dibuat pemerintah. Kurangnya partisipasi tersebut menyebabkan terhambatnya ketercapaian tujuan pemerintah, selain itu kurangnya partisipasi masyarakat juga timbul karena kurang adanya upaya penyuluhan yang intensif dan berkelanjutan untuk menumbuhkan kemampuan untuk berpartisipasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui manfaat akan partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan terhadap kehidupannya.

Salah satu masalah yang sedang diupayakan oleh pemerintah adalah permasalahan tentang tingkat partisipasi PKL dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah agar PKL ini berjualan sesuai dengan aturan sehingga tidak mengganggu kebersihan, keindahan, dan ketertiban suatu daerah. PKL pada dasarnya bukan merupakan sebuah masalah karena itu adalah hak ekonomi warga negara untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun PKL menjadi sebuah permasalahan ketika kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan berdagang sehingga mereka biasanya menempati ruang publik yang mengakibatkan ruang publik tersebut tidak dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya. Pemerintah Kota Bandung telah melakukan berbagai tindakan untuk mengantisipasi masalah pedagang kaki lima. Salah satunya dengan membuat kebijakan sebagai landasan hukum dalam melakukan tindakan penertiban lainnya maka dibentuklah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima. Namun tetap saja masih banyak sekali pedagang kaki lima yang kurang memiliki rasa patuh, sadar akan kewajibannya, dan hal lain yang mengakibatkan masih jauh untuk menjadi warga negara yang memiliki sikap tanggung jawab warga negara. Maka dari itu masih perlunya optimalisasi dari pemerintah Kota Bandung dalam menegakkan Perda No.4 Tahun 2011 sehingga dapat membina sikap tanggung jawab warga negara khususnya menyelesaikan permasalahan PKL ini dapat terselesaikan. Perlu diketahui bahwa jumlah PKL di Kota Bandung mencapai 20.326 orang yang

tersebar di 30 kecamatan. Dari hasil pengamatan sementara, keberadaan PKL di Kota Bandung banyak ditemui di pinggir jalan, di depan pasar atau kompleks pertokoan, bahkan di taman kota (ruang terbuka hijau).

Berkaitan dengan hal tersebut, yang dijadikan fokus penelitian ini yaitu di kawasan tujuh titik zona merah. Penulis memilih objek penelitian di tempat tersebut karena di daerah tersebut penulis dapat memperoleh data yang valid. Indikator untuk mengetahui sikap tanggung jawab warga negara dari seorang warga negara adalah dapat dilihat dari sikap yang ditunjukkan warga negara tersebut, seperti:

- Bertanggungjawab secara moral, misalnya merasa malu (*shame culture*) dan merasa bersalah (*guilt culture*) yang diikuti dengan selalu bersedia meminta maaf, melakukan kebaikan dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bertanggungjawab secara hukum, misalnya bersedia dikenai sanksi hukum yang berlaku apabila telah terbukti melanggar peraturan;
- Bertanggungjawab dalam konteks lingkungan, misalnya yang dilakukan tidak berakibat merusak lingkungan alam sekitarnya, misalnya: polusi, pencemaran lingkungan dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi masalah penelitian dengan beberapa rumusan masalah pokok, yaitu, *Bagaimana implementasi Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 dalam mempengaruhi sikap tanggung jawab PKL di Kota Bandung?*

B. METODE

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian dilakukan untuk memahami subjek secara mendalam maka dari itu penelitian kualitatif ini meneliti kondisi objektif tertentu dan peneliti berperan sebagai instrumen penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Danial dan Wasriah (2009, hlm.63) menyatakan bahwa "metode studi kasus merupakan metode yang intensif dan teliti tentang pengungkapan latar belakang, status, interaksi lingkungan terhadap individu, kelompok, institusi dan komunitas masyarakat tertentu". Secara umum studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how and why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer atau masa kini di dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian studi kasus merupakan penelitian yang lebih mendalam dan membicarakan kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan mengumpulkan data, menyusun dan mengaplikasikannya serta menginterpretasikannya.

Pemilihan lokasi dalam penelitian ini adalah kawasan zona hijau yakni suatu kawasan dimana PKL diperbolehkan berjualan disana seperti relokasi atau revitalisasi pasar. Kawasan zona hijau yang dipilih oleh peneliti adalah kawasan relokasi PKL di basemant Alun-Alun Kota Bandung. Di kawasan tersebut yang diteliti adalah PKL yang merupakan pindahan dari zona merah. Peneliti juga

melakukan penelitian di salah satu kawasan zona merah yakni kawasan Kepatihan. Selain lokasi penelitian utama tersebut, peneliti melakukan penelitian di Kantor Satpol PP Kota Bandung dan di Kantor DPRD Kota Bandung. Lokasi tersebut adalah untuk melakukan pencarian data mengenai upaya dan sikap pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi PKL. Adapun yang menjadi subjek penelitian pada penelitian ini terdiri dari :

1. Anggota DPRD : 2 Orang
2. Anggota Satpol PP : 2 Orang
3. PKL : 6 orang

Pada penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam penelitian ini juga diharuskan adanya validasi data. Validitas data dilakukan untuk membuktikan kesesuaian antara penelitian dengan apa yang sesungguhnya ada dalam dunia nyata. Hasil penelitian kualitatif seringkali diragukan karena dianggap tidak memenuhi syarat validitas dan reabilitas. Oleh sebab itu, peneliti harus menggunakan cara agar memperoleh tingkat kepercayaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kriteria kredibilitas.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemahaman dan Sikap Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung dalam Pelaksanaan Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011

Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 sebagai salah satu produk hukum pemerintah merupakan suatu alat kelengkapan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan partisipasi masyarakat agar Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 berjalan dengan efektif. Berkaitan dengan partisipasi masyarakat, diutarakan oleh Nurmalina dan Syaifulloh (2008, hlm. 19) bahwa sebagai warga negara yang baik harus berperan aktif dalam memberikan gagasan dan ide-idenya terhadap sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Peran aktif masyarakat yang dalam hal ini adalah PKL ditunjukkan melalui partisipasi dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dimulai dari perumusan kebijakan sampai tahap pelaksanaan Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2011.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 10 responden, diperoleh temuan bahwa PKL Kota Bandung pada dasarnya sudah mengetahui dan memahami mengenai isi dari Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 tersebut namun sikap yang ditunjukkan para PKL belum secara baik dan patuh untuk berpartisipasi melaksanakan Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 yang telah dibuat oleh DPRD Kota Bandung tersebut. Artinya, pemahaman yang dimiliki para PKL belum sepenuhnya memengaruhi terwujudnya suatu tindakan yang diharapkan pemerintah yaitu partisipasi warga negara. Sikap PKL tersebut tidak sesuai dengan pendapat Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2001, hlm.58)

dan Heryani (2011, hlm. 128) yang mengungkapkan bahwa dalam suatu implementasi kebijakan, proses memahami kebijakan merupakan hal penting. Memahami segala sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan agar selanjutnya menimbulkan tindakan-tindakan baik dari masyarakat berupa sikap partisipasi aktif dari masyarakat terhadap program pemerintah.

Mayoritas dari PKL di kota Bandung, masih melanggar berbagai aturan yang ada dalam Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2011. Bahkan ada juga PKL yang melakukan perlawanan kepada petugas ketika dilakukan penertiban. Padahal seperti kita ketahui, tahap implementasi kebijakan ini merupakan hal penting, seperti yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975, hlm. 3), Indiahono (2009, hlm.143), dan Agustino (2014, hlm. 140) bahwa implementasi kebijakan sebagai tahap yang paling penting karena merupakan suatu proses pelaksanaan kebijakan-kebijakan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Di dalam proses implementasi ada proses memahami kebijakan untuk selanjutnya menimbulkan tindakan-tindakan partisipatif dari masyarakat. Pada tahap implementasi kebijakan kita dapat mengetahui berhasil tidaknya suatu kebijakan dilihat dari hasil yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap yang ditunjukkan PKL di kota Bandung dalam pelaksanaan Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011 adalah belum memiliki sikap tanggung jawab sebagai warga negara karena tidak semua PKL melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara untuk taat dan patuh pada suatu peraturan bahkan yang melaksanakan dan mematuhi Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 pun ada yang karena terpaksa bukan secara sukarela. Keadaan ini bertentangan dengan pendapat Aristoteles (dalam Nurmawati dan Syaifulloh, 2008, hlm. 45) yang mengungkapkan bahwa warga negara yang bertanggung jawab merupakan warga negara yang memiliki kewajiban dengan berupaya seoptimal mungkin untuk melaksanakan dan menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, PKL kota Bandung belum memiliki upaya dalam pelaksanaan Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 dengan melaksanakan hak dan kewajibannya secara penuh, padahal sudah jelas kegiatan PKL di kota Bandung sudah diatur dalam Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011. Tanggung jawab warga negara ini akan timbul sebagai salah satu bagian dari partisipasi warga negara. Karena pada dasarnya, menurut Davis (dalam Satropoetro, 1986, hlm.13) salah satu unsur dari partisipasi warga negara atau *civic participation* adalah timbulnya rasa tanggung jawab dalam diri individu sebagai usaha untuk pencapaian tujuan dengan menaati segala kewajibannya sebagai warga negara.

Di sisi lain, masih banyak juga PKL yang menaati dan mengikuti program pemerintah dalam mendukung Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 ini seperti bersedia dipindahkan ke tempat relokasi yang telah disediakan oleh pemerintah dan ada juga PKL yang mengikuti berbagai pelatihan dari dinas terkait agar mampu bekerja dengan kreatif tanpa mengganggu ketertiban umum. Bornby dan Verhangen (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2013, hlm. 81) mengatakan pandangannya bahwa partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan atau

keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan masyarakat ataupun program pemerintah sebagai akibat dari interaksi sosial antar individu dalam suatu masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan dilaksanakan secara sadar dan sukarela. Pendapat tersebut dapat menjelaskan bahwa sikap PKL saat ini memang belum dikatakan secara penuh memiliki sikap partisipasi.

Selain itu, dari hasil wawancara dengan beberapa PKL menunjukkan sikap sebagian PKL yang mematuhi atau turut serta dalam program pemerintah bukan karena sikap sadar dan sukarela melainkan ada unsur terpaksa di dalamnya. Jika dikaitkan dengan pendapat Dusseldorp (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2013, hlm. 87) bahwa sebagian PKL yang taat dan berpartisipasi dalam melaksanakan Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 dilihat dari derajat kesukrelaannya masuk dalam kategori partisipasi tertekan oleh peraturan, yang menurut Dusseldorp adalah peran serta yang dilakukan karena takut menerima hukuman dari peraturan yang sudah diberlakukan. Walaupun seperti itu, setidaknya masih ada harapan untuk tercapainya tujuan pemerintah. Karena mengembangkan partisipasi masyarakat memang tidak mudah sehingga dari tahap partisipasi yang terpaksa semoga kedepannya menjadi partisipasi sukarela dengan tujuan untuk menyokong program pemerintah.

Partisipasi masyarakat merupakan cermin dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah dan proses kebijakan publik serta kesukarelaan mereka untuk berkontribusi bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan proses kebijakan publik tersebut. Menurut Surbakti (2010, hlm.179) partisipasi dan tanggung jawab warga negara merupakan aspek penting dalam negara demokrasi. Keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, apabila partisipasi warga negara dalam hal ini adalah PKL Kota Bandung dapat ditumbuhkan, maka tanggung jawab warga negara pun secara tidak langsung dapat terbina dari munculnya sikap partisipasi tersebut.

Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Warga Negara dalam Membina Tanggung Jawab Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung

Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendorong timbulnya partisipasi PKL dalam melaksanakan Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011 adalah adanya kemauan baik secara sukarela maupun terpaksa untuk menaati peraturan tersebut karena menyadari posisinya sebagai salah satu masyarakat Bandung. Dari hasil wawancara dengan PKL di kawasan *basemant* Alun-Alun Bandung, bahwa mereka walaupun pada awalnya sangat terpaksa, tapi karena melihat upaya pemerintah kota Bandung begitu keras maka secara perlahan mereka mulai menaati peraturan karena menyadari juga bahwa dirinya adalah bagian dari kota Bandung yang nantinya juga akan merasakan manfaatnya. Selain itu kemauan berpartisipasi dari PKL ini karena berharap pemerintah mampu memberikan perlakuan baik seperti memerhatikan keadaan ekonomi para PKL yang berjualan sesuai dengan aturan.

Kemauan untuk berpartisipasi ini, dijelaskan oleh Mardikanto dan Soebiato (2013, hlm.94) bahwa kemauan untuk berpartisipasi, sangat ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya untuk melaksanakan pembangunan dan memecahkan masalah demi tercapainya tujuan

pembangunan. Hal tersebut menjelaskan bahwa kemauan berpartisipasi sebagai salah satu faktor pendorong ini ditentukan oleh diri sendiri, bagaimana dirinya memilih pilihan terbaik untuk hidupnya serta mampu membedakan mana yang pantas dan tidak agar mampu memperbaiki kualitas diri. Kemauan masyarakat untuk patuh dan melaksanakan peraturan sangatlah diperlukan. Kemauan ini harus ditingkatkan lagi, karena partisipasi dalam suatu peraturan akan mendapat berbagai manfaat untuk mencapai berbagai tujuan pemerintah. Selaras dengan penjelasan Hamdi (2013, hlm.148) bahwa semakin tinggi derajat partisipasi maka semakin tinggi pula derajat ruang lingkup kemanfaatannya bagi masyarakat. Mengenai manfaat partisipasi itu sendiri disampaikan oleh Sastropoetro (1986, hlm.55), yaitu adanya kelancaran pelaksanaan berbagai program pemerintah dan juga akan menimbulkan gairah untuk turut bertanggungjawab guna melaksanakan berbagai kewajibannya. Dari hasil wawancara diketahui bahwa tingkat kemauan berpartisipasi PKL memang masih rendah belum lagi kemauan berpartisipasi masih didasari karena keterpaksaan. Tetapi, hal tersebut tetaplah menjadi sesuatu yang positif karena kemauan PKL ini akan mendukung berbagai program pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, kemauan berpartisipasi dari sebagian PKL ini, akan memengaruhi persepsi PKL lain untuk ikut menaati Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011.

Faktor pendorong selanjutnya berdasar pada temuan empiris penulis adalah ketegasan pemerintah dalam hal ini adalah SKPD penegakkan Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011 yakni Satpol PP dalam melakukan pengawasan dan juga penertiban PKL. Menurut penuturan beberapa PKL, ketegasan PKL di lapangan dengan melakukan patroli rutin membuat sebagian PKL merasa takut dan akhirnya menaati peraturan tanpa berjualan di tempat yang dilarang atau tidak sesuai dengan Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011. Berdasar hasil observasi, banyaknya petugas Satpol PP yang berjaga-jaga di kawasan Alun-Alun Kota Bandung dimana di sekitar kawasan tersebut banyak sekali PKL terlebih lagi kawasan tersebut merupakan mayoritas dari kawasan zona merah PKL. Selain itu banyaknya spanduk, poster ataupun media lain yang digunakan Satpol PP sebagai salah satu media sosialisasi dan juga menjadi pengingat bagi para PKL maupun masyarakat umum untuk tetap menaati peraturan. Hal yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki relevansi dengan pendapat Mardikanto dan Soebiato (2013, hlm. 94) yang memandang bahwa penyuluhan yang insentif dan berkelanjutan tidak hanya berupa penyampaian informasi melainkan juga dibarengi dengan dorongan dan harapan agar masyarakat mau berpartisipasi, serta berupaya yang terus menerus untuk meningkatkan kemampuannya untuk berpartisipasi.

Selain faktor pendorong yang telah dijelaskan penulis, ada pula beberapa faktor penghambat yang menghambat terwujudnya partisipasi warga negara. Faktor penghambat yang pertama yakni kurangnya keterampilan PKL untuk mencari pekerjaan ataupun menjalankan suatu pekerjaan lain selain berdagang. Menurut penuturan PKL itu sendiri, mereka tidak memiliki keterampilan untuk membuat suatu usaha baru, selain karena terhambat oleh kurangnya memiliki

modal, tingkat pendidikan PKL memang masih rendah, rata-rata adalah lulusan SD atau SMP. Selain itu, permasalahan kurangnya lapangan pekerjaan menjadi alasan PKL untuk mengandalkan usaha berdagangnya sebagai sumber penghasilan bagi keluarga.

Hasil temuan di atas ada kaitannya dengan pendapat Sastropoetro (1986, hlm. 22) yang mengungkapkan bahwa salah satu faktor pengaruh partisipasi adalah ketersediaan lapangan pekerjaan yang lebih baik. Selain itu, Mardikanto dan Soebiato (2013, hlm. 92) mengungkapkan bahwa kemampuan berpartisipasi masyarakat ditentukan oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang ia miliki. Jika tidak adanya ketersediaan lapangan pekerjaan maka otomatis partisipasi masyarakat dalam program pemerintah sulit untuk ditingkatkan bahkan dengan kondisi para PKL dengan pendidikan yang rendah juga akan menimbulkan kurangnya kesadaran untuk berpartisipasi.

Sesuai dengan pendapat Suharto (2012, hlm. 82) yang memandang bahwa melalui kebijakan akan dicapai kesejahteraan sosial yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011 sudah diatur segala macam hal yang menyangkut dengan pemecahan masalah mengenai PKL. Peraturan ini juga dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan PKL itu sendiri, namun kurangnya kesadaran PKL akan manfaat peraturan menyebabkan PKL bersikap kurang responsif sehingga manfaat yang harusnya didapatkan malah sama sekali tidak terasa oleh mereka. Dari hasil penelitian masih banyak PKL yang tidak secara sadar untuk menaati peraturan, padahal di sisi lain mereka sudah paham mengenai Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011 yang mengatur kegiatan berdagangnya. Hal tersebut dijelaskan oleh Mardikanto dan Soebiato (2013, hlm. 94) bahwa kemauan berpartisipasi ditentukan oleh sikapnya dalam meninggalkan nilai yang menghambat pembangunan dalam hal ini pelaksanaan Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011 dan juga sikap percaya diri untuk memperbaiki mutu hidupnya. Kurangnya kemauan dan komitmen PKL untuk meninggalkan perilaku dan kebiasaan buruknya dengan mengikuti program pemerintah memang menjadi penghambat kesadaran untuk berpartisipasi. Selain itu, PKL belum menyadari manfaat akan pentingnya berpartisipasi.

Faktor penghambat selanjutnya berkaitan dengan faktor lingkungan. PKL di kawasan jalan Kapatihan menyatakan ketika ada PKL yang berjualan di zona merah, maka pada akhirnya akan ada PKL lain yang mengikutinya karena merasa ada rekan lain yang melakukan pelanggaran. Hal ini merupakan bentuk interaksi yang berakibat buruk terhadap pelaksanaan Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011 karena menimbulkan dampak buruk dimana semakin banyak PKL lain untuk melanggar peraturan dan melakukan perlawanan secara bersama-sama terhadap petugas penertiban dalam hal ini adalah Satpol PP. Pengaruh lingkungan sosial terhadap partisipasi PKL ini memang sesuai dengan pandangan Mardikanto dan Soebiato (2013, hlm.98) juga Hamdi (2013, hlm.151) yang memandang bahwa kemampuan berpartisipasi di kalangan masyarakat dipengaruhi oleh kondisi dan iklim setempat yang mendorong atau justru menghambat mereka untuk berpartisipasi secara sukarela, terpaksa atau karena kebiasaan sehingga

menimbulkan keyakinan untuk berpartisipasi dan berkemampuan untuk memiliki tolak ukur dalam pelaksanaannya.

Upaya Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 sebagai Upaya Membina Tanggung Jawab Pedagang Kaki Lima

Berdasar pada temuan empiris, terdapat beberapa upaya pemerintah kota Bandung dalam membangun partisipasi masyarakat umum terutama PKL dalam pelaksanaan Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011. Upaya tersebut meliputi (a) penyuluhan pemerintah, seperti sosialisasi, penataan/relokasi, pembinaan PKL, patroli dan razia rutin, pemberian sanksi, evaluasi kebijakan; (b) pembangunan birokrasi.

a. Penyuluhan Pemerintah

Berdasarkan hasil temuan empiris, dalam pelaksanaan Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011, pemerintah telah melakukan program sosialisasi kepada seluruh masyarakat termasuk PKL. Sosialisai kepada para PKL dilakukan di beberapa tempat seperti di Pendopo, GOR KONI dan di beberapa kecamatan yang dipimpin oleh Walikota sebagai pembina tim SATGASUS PKL. SATGASUS PKL ini juga secara tidak langsung bertugas meningkatkan kesadaran hukum PKL. Sosialisasi berkelanjutan ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjalankan kebijakan Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011 dengan tujuan untuk menciptakan kota Bandung yang lebih baik. Sosialisasi tersebut meliputi penjelasan tentang substansi yang mengatur PKL maupun pengenalan tanda pengenalan PKL Kota Bandung.

Sesuai dengan pendapat Heryani (2011, hlm. 123) yang menyatakan bahwa komunikasi dalam proses kebijakan merupakan cara untuk memudahkan adanya partisipasi *stakeholders* dalam pembangunan. Hal tersebut dipertegas oleh Mardikanto dan Soebiato (2013, hlm. 96) yang menyatakan bahwa dalam setiap kebijakan harus ada proses komunikasi dengan menyampaikan pesan-pesan informatif dan persuasif yang relevan untuk menumbuhkan dan menggerakkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah. Sosialisasi kebijakan sebagai bentuk komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat merupakan salah satu hal penting yang harus dilaksanakan dalam tahap awal pelaksanaan Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011, melalui sosialisasi ini dijelaskan tentang segala hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan kebijakan serta menjelaskan dalam hal apa partisipasi masyarakat dibutuhkan serta bentuk partisipasi seperti apa yang diharapkan pemerintah dari masyarakat khususnya PKL.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Satpol PP bahwa sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menertibkan PKL maka pemerintah Kota Bandung melakukan relokasi terhadap PKL yang berada di zona merah. Relokasi ini bertujuan untuk mengurangi bahkan meniadakan PKL di zona merah agar tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak menimbulkan masalah lain terkait kegiatan PKL. Kawasan relokasi ini berada di kawasan Gede Bage, Cicadas, Basemant BIP, Basemant Alun-Alun Bandung, jalan Kebumen, jalan Jovankar dan

Monumen Perjuangan. Relokasi ini juga merupakan sebuah bentuk penyuluhan pemerintah sebagai suatu kepastian dari pemerintah dalam menindak PKL yang belum mengerti dan menanggapi secara sadar mengenai Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011. Tindakan pemerintah kota Bandung ini sesuai dengan pendapat Agustino (2014, hlm. 148) yang menyatakan bahwa kemampuan pejabat pelaksana kebijakan berpengaruh pada keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Alangkah baiknya pemerintah daerah dalam hal ini DPRD dan Satpol PP sebagai pelaksana kebijakan memperlihatkan upaya yang tegas untuk memaksimalkan pelaksanaan kebijakan yang baik, misalnya dengan melakukan relokasi sebagai solusi dan tindakan langsung dalam menertibkan PKL. Pemerintah dalam membuat kebijakan tidak hanya dengan penghimbau untuk patuh pada peraturan tetapi disertai dengan program langsung pemerintah sehingga peraturan yang dibahas dalam Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011 dapat memecahkan permasalahan di masyarakat.

Satpol PP dalam kaitannya dengan penertiban PKL selalu melakukan kegiatan rutin yakni patroli dan razia PKL. Hal ini dilakukan sebagai tindakan preventif agar para PKL merasa takut untuk melanggar peraturan. Dalam pelaksanaan upaya penertiban ini, Satpol PP dituntut untuk memiliki ketegasan dalam menindak PKL yang melawan. Tindakan tersebut, memiliki relevansi dengan pendapat Goggin (dalam Tacjhan, 2008, hlm. 82) yang memandang bahwa dalam implementasi kebijakan publik, pemerintah berperan dominan sebagai implementator, kinerjanya secara internal akan ditentukan oleh kapasitas organisasi yang dimilikinya. Selain itu, hasil temuan ini sesuai dengan pendapat Hamdi (2013, hlm. 150) bahwa partisipasi masyarakat merupakan proses dan keadaan yang dalam pengembangannya memerlukan waktu, sumber daya, pemahaman, dan ketekunan. Kinerja Satpol PP dalam menertibkan PKL dengan tekun dan tanpa henti ini merupakan hal yang baik dalam penertiban PKL. Dalam menegakkan Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011, kinerja Satpol PP pun harus memiliki kapasitas yang baik yakni dengan bersikap tegas, profesional, dan juga humanis. Kinerja Satpol PP ini penting adanya, karena dengan kegiatan patroli dan razia rutin, maka akan meminimalisir jumlah PKL yang berada di kawasan terlarang.

b. Pembangunan Birokrasi

Birokrasi dalam hal ini diartikan sebagai pemerintah. Pembangunan birokrasi ini merupakan hal yang tak kalah penting, pemerintah sebagai salah satu unsur penting juga sebagai teladan bagi rakyatnya. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa birokrasi atau aparat pemerintah yang memiliki tugas dalam pelaksanaan Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011 masih harus berupaya untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya sebagai pejabat negara. Karena menurut penuturan ketua Komisi A DPRD Kota Bandung bahwa karakter kepemimpinan dari pemerintah akan memengaruhi respon dari masyarakat. Menurut Hamdi (2013, hlm.156) mengutarakan pendapatnya bahwa pembangunan birokrasi difokuskan pada pembangunan perilaku profesional, pembangunan kesejahteraan dan pembangunan dukungan serta sikap rasional masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan birokrasi yang dilakukan pemerintahan kota Bandung dalam hal ini adalah DPRD dan Satpol PP Kota Bandung yakni dengan memperbaiki kinerja dan kualitas dari anggota agar dalam pelaksanaan Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011 dapat berjalan lancar dan menimbulkan respon baik dari masyarakat sehingga pemerintah dijadikan teladan baik oleh masyarakatnya. DPRD Kota Bandung dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pribadi dari pembuat peraturan, maka selalu dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). DPRD juga dalam pembangunan birokrasinya harus memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang kebijakan publik agar dapat membentuk, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan publik dengan baik serta sesuai dengan harapan masyarakat. Selain DPRD, Satpol PP memiliki program Diklatsar dan program Kesatpol PP-an untuk meningkatkan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Sesuai dengan pendapat Sunggono (1994, hlm.158) bahwa dalam pelaksanaan kebijakan harus adanya mentalitas petugas yang menerapkan kebijakan, maka dalam diri petugas harus ditanamkan kesadaran menaati hukum dan peraturan. Hal tersebut juga dipertegas oleh Hamdi (2013, hlm.25) yang mengungkapkan bahwa peran pemerintah menjadi penting karena peranannya membentuk harapan anggota organisasi mengenai kerjasama dalam penyelesaian permasalahan di kota Bandung. Pendapat tersebut menggambarkan bahwa sebelum pemerintah melakukan perintah kepada masyarakat untuk menaati peraturan, dari pihak pemerintah pun harus sudah memiliki pemahaman terhadap hukum dan juga kesadaran terhadap hukum. Pemerintah Kota Bandung sebagai sosok pemimpin bagi masyarakat Bandung haruslah memiliki kompetensi serta sikap yang baik sehingga menjadi motivasi dan tauladan bagi warganya untuk turut berpartisipasi dalam berbagai program pemerintah termasuk melaksanakan Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011.

Hambatan yang Dihadapi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2011 dalam Membina Tanggung Jawab Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung

Berdasarkan temuan empiris penulis, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah terkait dengan pembinaan tanggung jawab warga negara dalam pelaksanaan Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011. Hambatan yang pertama mengenai sosialisasi yang kurang efektif. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan ini dikarenakan masyarakat kurang mengetahui apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari sosialisasi kebijakan. Program sosialisasi pemerintah mengenai pelaksanaan Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011 telah dilakukan secara konsisten dan tanpa henti, namun hal ini kembali lagi kepada penerima informasi yaitu masyarakat kota Bandung termasuk PKL. Kurangnya respon dari masyarakat ini menjadikan sosialisasi kurang efektif. Hasil yang diharapkan dari program sosialisasi Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011 belum dapat dikatakan maksimal. Sesuai dengan pendapat Mardikanto dan Soebiato (2013, hlm.98) bahwa dalam komunikasi kebijakan sosialisasi adalah upaya untuk membangun

partisipasi masyarakat terutama dalam pemberian input dan keikutsertaannya untuk memanfaatkan hasil dari kebijakan. Ketika sosialisasi tidak memberikan dampak baik terhadap pelaksanaan kebijakan, maka hal ini menjadi suatu hambatan bagi pemerintah karena pemerintah harus mencari cara sosialisasi lain sehingga masyarakat termasuk PKL mampu menyadari manfaat sosialisasi serta dapat memberikan hasil sosialisasi dalam bentuk partisipasinya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Adapun hambatan lain terkait dengan sikap Satpol PP yang cenderung kurang konsisten dalam menindak pelanggaran Perda No. 4 Tahun 2011, artinya Satpol PP masih belum memiliki ketegasan yang tinggi dalam menertibkan PKL. Sikap yang ditunjukkan Satpol PP ini tidak sesuai dengan pendapat Nugroho (2014, hlm.673) yang memandang bahwa pemerintah sebagai salah satu pelaksana kebijakan harus memiliki kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan secara tegas dan terarah. Kurangnya komitmen pemerintah untuk bertindak tegas tanpa toleransi dalam pelaksanaan Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011 ini memang menjadi menghambat tumbuhnya tanggung jawab warga negara karena pada dasarnya ketegasan pemerintah ini akan menjadi suatu hal yang memengaruhi penentuan sikap dari warga negara.

Selain hambatan yang telah dibahas di atas, berdasarkan temuan empiris menyatakan bahwa kurangnya sumber daya menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011. Sumber daya yang dimaksud mencakup faktor-faktor yang mendorong dan memperlancar implementasi kebijakan seperti jumlah pegawai/personil, sarana atau perlengkapan serta dana yang dimiliki. Contohnya sumber daya kebijakan yang dimiliki oleh Satpol PP dalam upaya penertiban pedagang kaki lima masih sangat kurang bila dilihat dengan banyaknya jumlah PKL, jumlah petugas Satpol PP untuk saat ini hanya berjumlah 390 orang padahal yang dibutuhkan Satpol PP khususnya seksi penertiban membutuhkan ± 1000 personil. Mengenai permasalahan sumber daya dibahas oleh Heryani (2011, hlm. 120) yang menyatakan penentuan prioritas merupakan hal penting dalam sebuah implementasi kebijakan. Sumber daya ini bukan hanya mengenai sumber daya manusia tetapi juga berkaitan dengan sumber daya material yang mendukung seperti finansial, sarana prasarana dan juga waktu. Proses implementasi tidak akan berjalan baik apabila sumber daya dalam pelaksanaan ini kurang memadai dan bahkan mungkin mengakibatkan kurang maksimalnya manfaat dari sumber daya yang ada karena tidak mampu menyelesaikan semua permasalahan PKL dengan jumlah yang sedikit. Akhirnya penyelesaian permasalahan PKL dan pembinaan sikap tanggung jawab PKL akan terhambat.

Dengan jumlah PKL yang banyak ini tentu dalam melakukan penataan dan pembinaannya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Anggaran ini digunakan untuk membiayai program pendukung pelaksanaan kebijakan dan penyadaran hukum maupun penyediaan tempat untuk para PKL seperti pengadaan tempat relokasi yang memang membutuhkan banyak biaya. Sumber anggaran dalam pelaksanaan Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011 ini memang

berasal dari APBD Kota Bandung. Jika dikaitkan dengan pendapat Agustino (2014, hlm. 146) bahwa tersedianya dana sangat diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan agar memberikan peluang untuk tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Selain itu, ditegaskan oleh Edward III (dalam Nugroho, 2014, hlm. 673) yang menyatakan bahwa dalam suatu implementasi kebijakan harus memerhatikan sumber daya pendukung yang termasuk hal finansial atau dana yang dialokasikan dalam menunjang pelaksanaan kebijakan. Pendapat tersebut menjelaskan akan pentingnya pengadaan sumber daya finansial, karena berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana sebagai fasilitas pendukung pelaksanaan Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011 untuk menciptakan partisipasi masyarakat yang tinggi. Tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011 tak akan berhasil.

Hambatan lain yang dihadapi pemerintah adalah rendahnya kesadaran PKL untuk mematuhi peraturan pemerintah. Sikap rendahnya kepatuhan masyarakat ini dikarenakan kurangnya rasa hormat masyarakat terutama PKL kepada pemerintah. Padahal dari sisi pemerintah, partisipasi masyarakat dalam mematuhi peraturan merupakan suatu dukungan dalam pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2011. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Agustino (2014, hlm. 148) yang menganggap bahwa partisipasi publik sangat penting artinya dalam proses pelaksanaan kebijakan di lapangan. Ketika warga negara menghormati pemerintah, maka secara otomatis mereka akan patuh pada peraturan pemerintah. Rasa hormat masyarakat akan timbul ketika masyarakat memiliki kepercayaan kepada pemerintah, namun dilihat dari hambatan lain yang menyatakan bahwa pemerintah kurang memiliki ketegasan bagi pelanggar, sehingga akan menghambat timbulnya rasa hormat masyarakat terhadap pemerintah. Dampak buruk lainnya adalah pelaksanaan Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011 tidak akan berjalan dengan efektif karena kurangnya dukungan masyarakat untuk secara sukarela berpartisipasi dalam program pemerintah.

Keempat hambatan yang telah penulis jelaskan, pada akhirnya bukan hanya menjadi suatu permasalahan yang dibiarkan begitu saja. Pemerintah Kota Bandung seyogyanya harus memberikan beberapa solusi dari timbulnya hambatan tersebut. Menurut Pena (dalam Hasiholan, 2010, hlm. 34), terdapat tiga pilihan mengatasi PKL, yaitu negara harus menjadi kunci dalam mengatur PKL, karena keberadaan negara sangat penting dalam proses pembangunan dan juga harus diadakan diskusi kembali antara pemerintah dan PKL untuk menegosiasikan mengenai lokasi usahanya. Selain itu, berdasar hasil literasi yang penulis lakukan, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011 agar menimbulkan sikap tanggung jawab PKL di kota Bandung, diantaranya adalah (a) dalam proses sosialisasi harus diberikan informasi selengkap-lengkapnyanya sehingga memungkinkan para PKL menuruti kehendak pemerintah untuk menempati tempat relokasi; (b) Konsistensi petugas dalam melaksanakan penegakkan Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011 harus lebih ditingkatkan; (c) Pemberian sanksi yang tegas dan berat agar menjadi efek jera bagi pelanggar. Dari tiga solusi tersebut, kiranya dapat diperhatikan oleh

pemerintah sehingga permasalahan PKL ini akan cepat terselesaikan. Selain itu, akan menimbulkan manfaat lain dengan tumbuhnya partisipasi masyarakat yang tinggi di kota Bandung sehingga menjadikan masyarakat Bandung menjadi warga negara yang baik.

D. KESIMPULAN

Tanggung jawab para pedagang kaki lima (PKL) dalam pelaksanaan Perda No.4 Tahun 2011 sebagai salah satu bentuk partisipasi warga negara merupakan hal yang penting bagi tercapainya tujuan peraturan daerah tersebut dalam membangun Kota Bandung yang bersih dan tertib. Pemerintah Kota Bandung melalui berbagai elemen pemerintahannya telah berupaya untuk menata dan menertibkan PKL. Sejak berlalunya Perda No. 4 Tahun 2011, ketertiban PKL mulai meningkat. Namun para PKL belum sepenuhnya sadar dan bertanggung jawab untuk menaati peraturan daerah sehingga masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran. Walaupun pemerintah sudah berbagai cara menertibkan PKL dan membangun kesadaran PKL, tetap saja masih banyak PKL yang melawan dan tetap berjualan di kawasan zona merah sehingga tetap mengganggu ketertiban dan kenyamanan bahkan menimbulkan kemacetan. Sikap para PKL seperti ini menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab sebagai warga negara untuk melaksanakan Peraturan Daerah.

Dalam halnya upaya pemerintah dalam melaksanakan Perda No.4 Tahun 2011 sebagai upaya pembinaan tanggung jawab warga negara ini maka dapat dijabarkan bahwa tanggung jawab warga negara pada dasarnya merupakan cermin dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah dalam hal melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta kesukarelaan mereka untuk berkontribusi bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dalam proses kebijakan publik. Banyaknya dan konsistennya upaya pemerintah dalam membina tanggung jawab warga negara seperti diutarakan di pembahasan awal tidak akan sia-sia karena sedikit-demi sedikit hasil positif mulai terasa dengan melihat Kota Bandung yang lebih tertib, bersih dan nyaman. Hal tersebut juga dipengaruhi dengan adanya kerjasama antar berbagai elemen pemerintah untuk menciptakan tujuan yang telah diinginkan dan diharapkan sebagai bentuk harapan bersama.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2014). *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Anderson, J.E. (1994). *Public Policy Making: An Introduction 7th Edition*. Boston : Wadsworth.
- Borre, O dan Goldsmith, M. (1998). *The Scope of Government*. Oxford: Oxford University Press.
- Budimansyah, D. (2010). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.

- Center for Civic Education (1994). *National Standard for Civics and Government*.
- Danial, E. dan Wasriah, N. (2009). *Metode Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Dunn, W.N. (2000). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Hamdi, M. (2013). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor : Ghalia.
- Hasiholan, T. (2010). *Strategi Penanganan Pedagang Kaki Lima Di Kota Administrasi Jakarta Utara*. (Tesis). Program Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi UI. Jakarta: Tidak diterbitkan.
- Heryani, A. (2011). *Paradigma Kebijakan Publik*. Bandung: UNPAD Press.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media.
- Liana, R.M.V. (2011). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Kota Semarang)*. (Srkripsi). Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Mardikanto, T. dan Soebiato, P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurmalina, K dan Syaifulloh. (2008). *Memahami Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium PKn UPI.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)
- Rencana Strategis Satpol PP Kota Bandung Tahun 2013-2018
- Sastropoetro, S. (1986). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Suharto, E. (2014). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sundawa, D dan Solihat, L. (2010). *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Bandung: Laboratorium PKn FPIPS UPI.
- Sunggono, B. (1994). *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Syafie, I.K. (2014). *Proses Legislatif*. Bandung : Refika Aditama.
- Tachjan. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI Bandung.
- Van Meter, D dan Van Horn, C. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Administration and Society. Vol.6 No.4.
- Wahab, S.A. (2001). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Widagdho, D, dkk. (2012). *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wuryan, S. dan Syaifullah. (2008). *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Bandung: Laboratorium PKn